

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah* : Yogyakarta.
- Adiyanta, Susila. 2019. Karakteristik Responsif Peraturan Daerah Tentang Pajak-Pajak Daerah Sebagai Representasi dan Partisipasi Kehendak Publik. *Jouenal Administrative Law and Governance*. Vol 1 (3).
- Aisyah, Siti. 2019. Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Karyawan PT Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Medan. *Journal Accountig and Management* Vol.1 (1).
- Ali, Khaidir & Agung Saputra. 2020. Tata Kelola Pemerintahan Desa Tergadap Prningkatan Pelayanan Publik di Desa Pematang Johar. *Jurnal Dharmawangsa* Vol 14 (4).
- Asih, Surya. 2018. Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan Bagi hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik* Vol 9 (1).
- Aswati, Wa Ode, Arifuddin Mas'ud, Tuti Nurdianti Nudi. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Knator UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol.3 (1).
- Bachtiar, Erwin & Sihar Tambun. 2020. Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Sikap Nasionalisme Serta Dampaknya Terhadap Niat Menjadi Wajib Pajak yang Patuh. *Jurnal Media Akuntansi Perpajakan* Vol.5 (2).
- Cahyani, Luh Putu Gita & Naniek Noviar. 2019. Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi* Vol.26 (3).
- Fitria, Pipit Annisa & Edy Supriyono. 2019. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Of Economics and Banking* Vol 1 (1).
- Hartanti, Karina Alviani, & Ratiyah. 2020. Pengaruh Samsat Keliling, Samsat Drive-Thru, E-Samsat Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Jakarta Timur. *Jurnal Online Insan Akuntan* Vol.5 (1).
- Haskar, Edi. 2020. Hubungan Pajak dan Zakat Menurut Perspektif Islam. *Jurnal Penelitian dan kajian Ilmiah* Vol 14 (2).
- Lesmana Eko J. 2017. *Undang-Undang Pajak Lengkap*: Mitra Wecana Media.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi
- Nasir, Muhammad Safar. 2019. Analisis Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah setelah Satu Dekade Otonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. Vol 2 (1).

Resmi Siti.2017.*Perpajakan:Teori*.Jakarta:Salemba Empat

Setyawan, Nikken Retnoayu, Rita Kalalinggi & Rosa Anggraeiny. 2019. Inovasi Pelayanan Publik Melalui Program E-samsat di Kantor Samsat kota samarinda. Ejournal Pemetintahan Integratif Vol 7 (1).

Samsat.jambiprov.go.id

Shidiq, Umar & Miftachul Choiri. 2019. Meode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. Ponorogo: CV Nata Karya.

Siahaan Marihot Pahala.2013.*Pajak Daerah & Retribusi Daerah*.Jakarta:Rajawali Pers.

Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabet.

Mardiyanti, Eka Putri. 2019. Evaluasi Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Layanan Drive Thru Pada Kantor Samsat Sidoarjo. Stiesia Surabaya

Putra, Anjik Tri Laksana & Nur Fadjrih Ayik. 2021. Evaluasi Kepatuhan Pembayaran Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Negara Pasca Penerbitan PP 23 Tahun 2018 Pada Pelaku UMKM di Kota Madiun. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol 10 (3).

Quraisy, Said. 2022. Penegakan Hukum Terhadap Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pajak Aceh (Studi Kasus dikabupaten Nagan Raya). UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum.

Waluyo.2013.*Perpajakan Indonesia*.Jakarta:Salemba Empat.

Wardani, Dewi Kusuma & Rumiyatun. 2017. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Akuntansi. Vol 5 (1).

M.tungka, H.Subijono (2015:931) objek kendaraan adalah manifestasi dari penyerahan terbaik.

Nasir, carunia (2017) tentang pendapatan asli daerah hasil dari wilayah nya sendiri dan bisa ditingkatkan berdasarkan undang-undang.